

**PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI PALEMBANG
PADA TAHUN 1942-1950 (SUMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN
MATA KULIAH SEJARAH PENDIDIKAN)**

Pandu Wiranata

Alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri

email: pandufkip@gmail.com

Sani Safitri, Alian Sair

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Perkembangan Pendidikan di Palembang Pada Tahun 1942-1950” Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pendidikan di Palembang pada tahun 1942-1950 dan Bagaimana Perkembangan Pendidikan di Palembang pada tahun 1942-1950. Sesuai dengan masalah tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pendidikan di Palembang pada tahun 1942-1950, dan bagaimana perkembangan pendidikan pada saat itu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa pendidikan yang dibuka di Palembang pada jaman Jepang tidak banyak, dimana sekolah-sekolah di jaman Belanda yang jumlahnya belum memadai oleh Jepang semakin dikurangi, karena pemerintahan Militer Jepang hanya memberikan sedikit perhatiannya terhadap pendidikan di daerah ini jika dibandingkan dengan di Jawa. Sekolah-sekolah yang ada pada masa pendudukan tentara Jepang ialah yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang dan yang diselenggarakan oleh badan-badan Swasta seperti: Taman Siswa, Muhammadiyah, *Methodist* (Zending), Katolik (Misi) dan alim ulama setempat. Pada masa peralihan antara tahun 1945-1950 Sumatera selatan merasakan berbagai kesulitan baik di bidang sosial ekonomi, politik maupun kebudayaan, termasuk pendidikan. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah hanya beberapa persen saja yang dapat menikmati sekolah, sehingga sisanya 90% penduduk Sumatera selatan khususnya Palembang masih banyak yang buta huruf.

Kata Kunci : Pendidikan, di Palembang Pada Tahun 1942-1950.

Abstract: This research entitled "Development of Education in Palembang In Year 1942-1950" The problems in this research is How Education in Palembang in 1942-1950 and How Development of Education in Palembang in 1942-1950. In accordance with the problem the purpose of this study is intended to know more clearly how the education in Palembang in 1942-1950, and how the development of education at the time. The methodology used in this study is the historical method. From the results of this study it is found that the education that opened in Palembang in the Japanese period is not much, where the schools in the Netherlands that the number is not sufficient by the Japanese increasingly reduced, because the military government of Japan gave little attention to education in this area when compared with Java. The schools that existed during the occupation of the Japanese army were organized by the Japanese government and organized by private bodies such as Taman Siswa, Muhammadiyah, Methodist (Zending), Catholic (Mission) and local religious scholars. In the Japanese era Zending and Mission schools were forced to close, as Methodist schools used the English language of instruction, while the Catholic schools of teachers were mostly Dutch. In general, education in early independence is strived to match and approach the education system in developed countries. During the transition between 1945-1950, South Sumatra experienced difficulties in both socioeconomic, political and cultural fields, including education. Of the number of school-age children only a few percent who can enjoy the school, so the remaining 90% of the population of South Sumatra, especially Palembang are still many who are illiterate.

Keywords: *Education, in Palembang In 1942-1950*

PENDAHULUAN

Bumi Nusantara cukup menarik bagi bangsa-bangsa di dunia. Hal ini terbukti dari banyaknya bangsa lain yang ingin menginjak atau menduduki Indonesia. Sifat masing-masing penjajah juga berbeda, akan tetapi pada umumnya mereka semua ingin menguasai habis kekayaan alam yang terkandung di bumi Nusantara. Karena itu bangsa-bangsa penjajah saling berebut cara untuk mendapatkan nusantara dari penjajahan Belanda pada saat itu. Sebelum invasi (penyerbuan) Jepang ke Indonesia, sudah ada kabar angin. Bahwa kolonial Belanda

takut dengan adanya "kolonnye kelima tentara Jepang". Suatu pasukan yang mempersiapkan di daerah yang akan diserang dengan berbagai fasilitas sehingga memudahkan invasi nantinya. Asal kata *kolonnye* adalah angkatan kelima (rahasia) (Mahmud. 2004:70).

Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun yang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada saat Indonesia merdeka. Tentara Jepang mendarat pertama kali pada tanggal 11 Januari 1942 yang diawali dengan menguasai daerah-daerah penghasil minyak, seperti Tarakan, Balikpapan serta

beberapa daerah di Kalimantan, dan Sumatera. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di tiga tempat di Jawa, yaitu di daerah Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Tentara Jepang kemudian menyerbu pos tentara-tentara Belanda serta mengalahkannya. Pada 8 Maret 1942, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati oleh Belanda (Burhanuddin, 2011: 21).

Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia, semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Tidak mengherankan bahwa segala komponen sistem pendidikannya ditujukan untuk kepentingan perang. Karakteristik pendidikan Jepang adalah: dihapusnya “dualisme pendidikan”; berubahnya tujuan pendidikan; proses pembelajaran diganti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan; pendidikan dilatih agar mempunyai semangat perang dan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.

Sejak awal Jepang menjadikan Palembang sebagai pintu masuk sekaligus salah satu pangkalan terpenting dalam invasinya. Jadi ini memberikan perhatian khusus pada kepentingan politik Jepang di Asia Tenggara, khususnya di daerah Palembang dan reaksi lokal terhadap militer Jepang.

Akan diperlihatkan pula jalinan hubungan antara perubahan periode pendudukan Jepang dengan periode sebelumnya. Karena proses awal keterlibatan Jepang di Palembang dalam tataran politiknya. Jepang menempatkan Palembang sebagai salah satu daerah inti dalam rencana pendudukan di daerah Palembang ini (Rivai, 2001: 97).

Adapun sekolah-sekolah baru yang didirikan oleh Jepang di Sumatera Selatan di antaranya ialah Sekolah Guru, Sekolah Keputrian, Sekolah Pegawai Negeri. Semuanya didirikan di Palembang. Sekolah-sekolah lainnya yang didirikan ialah Mizuho-Gakko-en di Palembang, Minarai Gakko dan Skyu Kogyo-Gakko (Sekolah Teknik Minyak) di Plaju. Sekolah Guru yang dibuka di Palembang adalah Kyo-in Yoseijo atau Syoto Syihan Gakko (Sekolah Guru 2 Tahun).

Sistem pengajaran yang dipakai adalah melanjutkan sistem sebelumnya dengan memasukkan antara lain bahasa Jepang dan taisho (gerak badan) ke dalam kurikulum. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Jepang sebagai bahasa untuk mata pelajaran wajib. Bahasa Belanda tidak boleh dipergunakan dalam korespondensi dan pers, serta tidak boleh lagi diajarkan di sekolah-sekolah. Bahasa Belanda dihapuskan diganti dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang dianjurkan dipakai dalam korespondensi dan pers di samping

bahasa Indonesia. Tiap-tiap pagi sebelum mulai belajar para pelajar diharuskan lebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, penghormatan (kirei) kearah Tokyo dan Taiso. Para pelajar diharuskan pula melakukan latihan militer membuat kebun untuk ditanami dengan tanaman yang menghasilkan bahan makanan seperti padi, jagung dan lain-lain; bekerja di kebun-kebun Jepang (Danasuparta H, Djumhur I, 1976: 193).

Setelah awal kemerdekaan sistem pendidikan dan persekolahan keadaanya berubah di daerah ini mengenal tiga tingkat pendidikan/persekolahan untuk semua golongan penduduk : (1) Pendidikan Rendah, (2) Pendidikan Menengah, (Pendidikan Tinggi). Sebagai akibat adanya kesempatan belajar yang diberikan kepada setiap anak, maka perkembangan murid dari ketiga tingkat sekolah tersebut dari tahun ke-tahun bertambah terus, lebih-lebih setelah tahun 1950 yaitu terbentuknya kembali Negara Kesatuan RI di Palembang ini. Keinginan untuk membuka Sekolah Lanjutan baru dapat direalisasikan pada tanggal 1 pebruari 1946 di kota Palembang atas anjuran Dr.A.K. Gani. Dalam tahap pertama didirikanlah tiga Sekolah Lanjutan tingkat Pertama yaitu: Sekolah Menengah Oemoem Pertama (SMOP) yang lazim dikenal dengan nama SMP, Sekolah Guru Menengah (SGM)

dan Sekolah Kepandaian Puteri (SKP). Sebagai pimpinan SMP ialah R.H.A. Rani dengan dibantu oleh beberapa orang guru misalnya: Wahidin Abas Surapati, Sjahrizad Sjahab, R. Soewarno, Abdullah Bakri dan Nuroni Adil. Sekolah tersebut merupakan SMP yang pertama kalinya dibuka setelah Proklamasi Kemerdekaan, yang pada waktu itu memiliki murid sebanyak \pm 700 orang. Pada awal kegiatan sekolah tersebut banyak sekali mengalami kesulitan terutama mengenai tempat (gedung) dan tenaga penagajar yang diperlukan. Berkat kerja sama dengan sekolah-sekolah agama seperti *Qur'aniyah*, maka kesulitan tempat belajar mulai dapat diatasi dan demikian pula mengenai tenaga pengajarnya semakin bertambah (Kementerian Penerangan, 1954: 631).

Sistem pendidikan di Palembang mulai berubah lagi, pada pendidikan jaman Jepang Sekolah Umum ditutup atau tidak dibuka sama sekali, dan pada awal kemerdekaan sekolah-sekolah pada jaman pendidikan Jepang yang sebelumnya ditutup akhirnya dibuka kembali. Atas dasar tersebut, penelitian ini lahir untuk mengelaborasi pendidikan di Palembang pada tahun 1942-1950.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendidikan Formal dan Non Formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-

sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi (Djumhur, 1976:195). Menurut Manheim de Jong (1984: 5) sejak tahun 1954 telah menyatakan bahwa pendidikan masyarakat merupakan salah satu penemuan paling menentukan dalam abad ini yang lebih hebat dari pendidikan formal, belum dihargai bagaimana seharusnya.

Sedangkan menurut Aida Mj (2005: 67) Pendidikan jalur formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, demokratis, menjunjung tinggi hak azasi manusia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan kreatif, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berdaya saing di era global.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan tinggi. Jadi dalam pendidikan pada tahun 1942-1950 bahwa pada jaman penjajahan Jepang di Palembang setiap masyarakat wajib.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran, yang banyak terdapat di Masjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua Gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya. Menurut Wahyudi Ruwiyanto (1994: 1) Pendidikan nonformal dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk segala strata ekonomi, strata sosial, dan strata pendidikan, disamping dapat pula untuk ikut memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang mendesak atau meresahkan.

2. Pendidikan Pada Jaman Belanda

Pada zaman kolonial pemerintah Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Ciri yang khas dari sekolah-sekolah ini ialah tidak adanya hubungan berbagai ragam sekolah itu. Namun lambat laun, dalam berbagai macam sekolah yang terpisah-pisah itu terbentuklah hubungan-hubungan sehingga

terdapat suatu sistem yang menunjukkan kebulatan. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia semula terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi kemudian berkembang secara vertical sehingga anak-anak Indonesia, melalui pendidikan menengah dapat mencapai pendidikan tinggi, sekalipun melalui jalan yang sulit dan sempit (Rivai, 2001: 29).

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis di bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, politik di Nederland maupun di Hindia Belanda. Selain itu Kondisi pendidikan di zaman Belanda juga tidak melebihi perkembangan pendidikan di zaman Portugis dan Spanyol. Pendidikan yang sebelumnya berstatus milik penguasa kolonial Portugis atau Gerja Khatolik Roma. Secara geografis pusat pendidikan yang di kelola Belanda juga relative terbatas didaerah Maluku dan sekitarnya. Di Jawa, Sulawesi tak terkecuali di Sumatera kolonial Belanda memilih untuk tidak melakukan kontak langsung dengan penduduk, tetapi mempergunakan mediasi para penguasa lokal Pribumi (Nasution, 2011: 3).

Secara umum sistem pendidikan khususnya system persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*) Pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkatan sekolah dasar

mempergunakan system pokok yaitu: Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

1. Sekolah rendah Eropa, yaitu ELS (*Europese Lagere school*), yaitu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Eropa atau anak-anak turunan Timur asing atau Bumi putra dari tokoh-tokoh terkemuka. Lamanya sekolah tujuh tahun 1818.
2. Sekolah Cina Belanda, yaitu HCS (*Hollands Chinese school*), suatu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan tmur asing, khususnya keturunan Cina. Pertama didirikan pada tahun 1908 lama sekolah tujuh tahun.
3. Sekolah Bumi putra Belanda HIS (*Hollands inlandse school*), yaitu sekolah rendah untuk golongan penduduk Indonesia asli. Pada umumnya disediakan untuk anak-anak golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka atau pegawai negeri. Lamanya sekolah tujuh tahun dan pertama didirikan pada tahun 1914.

PEMBAHASAN

1. Pendidikan Di Palembang Pada Masa Jepang (1942-1945)

Pada mulanya Jepang memberikan pendidikan di Palembang dengan meneruskan pendidikan yang sudah ada sebelumnya, yaitu pada masa pendudukan Belanda dengan pendidikan ala barat. Akan tetapi kemudian Jepang merombaknya yaitu dengan memasukkan doktrin Asia raya agar sesuai dengan tujuan serta maksud Jepang. Pendidikan dari

jaman pendudukan Belanda dirombak secara total, karena pada jaman pendudukan Belanda di Palembang yang diberi pendidikan hanya kaum tertentu saja. Yaitu golongan elite saja, karena dengan itu golongan elite dapat mempengaruhi orang banyak serta memerintahkan rakyatnya agar mengikuti Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, secara langsung Jepang menghimbau kepada semua masyarakat Palembang agar dapat membantu Jepang memenangkan perang. Oleh karena itu pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya Palembang (Zed, 2003: 210).

Adapun perubahan pendidikan dan pengajaran pada jaman Jepang sebagai berikut:

1. Pelatihan Guru-guru

Usaha penanaman *Ideologi Hakko Ichiu* melalui sekolah-sekolah dimulai dengan mengadakan pelatihan guru-guru. Guru-guru diberi tugas sebagai penyebar ideologi tersebut. Pelatihan tersebut dipusatkan di Jakarta. Tidak hanya di Palembang Setiap kabupaten diwajibkan mengirim wakilnya untuk mendapat gemblengan langsung dari pimpinan Jepang. Gemblengan ini berlangsung selama 3 bulan, jangka waktu tersebut dirasa cukup untuk menjepangkan para guru.

2. Perubahan-perubahan Pendidikan pada Jaman Jepang

Dihapusnya dualisme pengajaran: berbagai jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman pemerintahan Belanda dihapuskan sama sekali. Sehingga hanya ada satu sekolah rendah, yaitu Sekolah Rakyat 6 tahun (*Kokimin*

Gakkoo). Sekolah-sekolah desa diganti namanya menjadi sekolah pertama. Jadi, susunan pengajarannya adalah Sekolah Rakyat 6 tahun, Sekolah Menengah 3 tahun, dan Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi dan bahasa pengantar bagi semua jenis Sekolah. Bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib dan adat kebiasaan Jepang harus ditaati.

2. Perkembangan Pendidikan Di Palembang Pada Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Tujuan pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati. Pendidikan ditekankan pada penanaman semangat patriotisme, karena pada saat itu diseluruh daerah sedang mengalami perjuangan fisik dan sewaktu-waktu pemerintah kolonial Belanda masih mencoba untuk menjajah kembali di seluruh wilayah. Selanjutnya pendidikan sudah mulai ditujukan kepada pembentukan manusia yang diinginkan oleh konsep Manipol Usdek. Kurikulum pasca kemerdekaan saat itu diberi nama *Leer Plan* dalam bahasa Belanda artinya Rentjana Peladjaran, lebih terkenal ketimbang kurikulum 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Peladjaran 1945-1947 dikatakan sebagai

pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena saat itu bangsa Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan dan bertujuan untuk pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Sasaran utama pendidikan bagi anak-anak yaitu pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani (BP3K, 1975: 143).

Perkembangan pendidikan di Palembang pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950 dengan dipelopori Dr. A. K. Gani, keinginan membuka sekolah lanjutan ini ternyata baru dapat direalisasikan pada bulan Maret 1946. Dalam tahap pertama didirikanlah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) yang waktu itu disebut dengan nama SMP dan SGM (Sekolah Guru Menengah), yang masing-masing dipimpin oleh RHA Rani dan Abdul Malik (Proyek IDKD, 1971/1978: 184).

SMP yang pertama ini, mempunyai murid sebanyak 700 orang, tetapi gedung sekolahnya tidak ada, demikian pula guru-gurunya masih sangat kurang. Berkat kerja sama dengan sekolah-sekolah Agama seperti Quraniah, maka kesulitan

tempat belajar dapat mulai diatasi. Bahkan akhirnya berkat bantuan dari berbagai pihak, berhasil dibangun tiga buah lokal sebagai gedung SMP di jalan Serabungan Palembang. Inilah gedung SMP yang pertama secara terus-menerus dipakai sebagai tempat belajar baik di waktu pagi maupun sore hari. Pelajaran berjalan tidak teratur, karena situasi keamanan pada saat itu.

Sebagai akibat pertempuran lima hari lima malam di kota Palembang pada awal bulan Januari 1947 serta pengunduran Pemerintahan RI sejauh radius 20 km keluar kota Palembang, maka SMP ikut pula ditutup. Tetapi pada bulan Agustus 1947 diusahakan agar SMP dapat diteruskan dan dibuka kembali. Kali ini dengan nama SMO (Sekolah Menengah Oemoem). Meskipun tidak ada pemimpin yang memrintahkan untuk membuka kembali sekolah, tetapi RHA Rani dan kawan-kawan, berusaha memimpin dan membina SMO (Sekolah Menengah Oemoem) sampai tahun 1950, yaitu pada saat Negara Sumatera Selatan dibubarkan pada bulan Maret 1950.

Pemerintah pendudukan Belanda juga membuka sekolah menengah (Middelbare School) atau disingkat MS, tetapi sekolah ini tidak dapat mengumpulkan murid lebih dari 50 orang. Pemerintah Belanda mengetahui tentang Perkembangan

SMO, tetapi mereka tidak menggungunya. Tak disangkal bahwa hubungan antar SMO dan Taman Siswa di satu pihak dengan MS, secara instansional di lain pihak tidak baik. Tetapi sudah demikian halnya hubungan antara siswa-siswanya. Hubungan mereka akrab dan baik sekali. Hal ini terbukti dengan adanya usaha untuk mengibarkan kembali bendera Merah Putih di halaman Taman Siswa yang diprakarsai dan dihadiri oleh siswa-siswa dari ketiga sekolah tersebut pada akhir bulan Pebruari 1948. Setelah agresi I 21 Juli 1947 bendera Merah Putih tidak boleh berkibar lagi di kota Palembang (Abdullah,1991: 185).

Pada tahun 1950 SMO yang dipimpin oleh RHA Rani di pecah menjadi dua sekolah yaitu SMP I dan SMP II dan sebagai sekolah yang akan menampung lanjutan dari siswa-siswa SMP yang telah mengikuti pelajaran di SMO selama 3 sampai 4 Tahun, maka pada tahun 1950 itu didirikan di Palembang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yaitu SMA dan SGA yang masing-masing dipimpin oleh BM Adnan dan Nuzuar. Sedangkan RHA Rani sendiri, sesuai dengan keputusan pemerintah RI di Jogjakarta di angkat sebagai Kepala Inspeksi pendidikan di Sumatera Selatan (Depdikbud,1991/1992: 186).

Adapun beberapa Jenjang Pendidikan pada periode 1945-1950 sebagai berikut:

1. Pendidikan Rendah (3 Tahun)
Pendidikan yang terendah di

Palembang sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat (SR). Lama pendidikan Sekolah Rakyat adalah tiga tahun. Maksud pendirian SR ini adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 november 1946 NO 1153/Bhg A yang menetapkan daftar pelajaran SR dimana tekanannya adalah pelajaran bahasa berhitung. Hal ini dapat terlihat bahwa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam adalah untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa daerah dan 17 jam berhitung untuk kelas IV < V dan VI. Tercatat sejumlah 24.775 buah SR pada akhir tahun 1949 pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia (Kosim, 2001: 78).

Pada awalnya SMP merupakan lanjutan dari masa penjajahan Jepang dan rencana pelajaran yang digunakan pun juga sama, tetapi dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri PPK tahun 1946, maka diadakannya pembagian A dan B mulai kelas II sehingga terdapat

kelas IIA, IIB, IIIA dan IIIB. Dibagian A diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Sementara itu dibagian B sebaliknya diberikan Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.

Kementerian PPK hanya mengurus langsung SMT yang ada di pulau Jawa terutama yang berada di kota-kota seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Cirebon. SMT di Luar Pulau Jawa, Seperti di Sumatera selatan berada di bawah pengawasan pemerintah daerah berhubung sulitnya perhubungan dengan pusat. SMT merupakan pendidikan tiga tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

Rencana pelajaran pada waktu belum jelas, dan yang diberikan adalah rencana pelajaran dalam garis besar saja. Pada waktu itu masih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum stabil. Rencana pembelajaran yang berlaku yaitu: (1) isinya memenuhi kebutuhan nasional, (2) bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, (3) mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Ujian akhir dapat diselenggarakan oleh masing-masing sekolah selama belum ada ujian negara, tetapi setelah tahun 1947

barulah berlaku ujian negara tersebut.

Penyelenggara pendidikan selama masa 1945-1950 mengacu pada 10 hal yang diajukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada tanggal 1 Januari 1946 terbentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pendidikan masyarakat bertujuan membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang dapat dicapai dengan dua cara, yaitu metode belajar serta metode bekerja yang dilaksanakan secara masal dan integral di suatu desa (Kosim, 2001: 87).

KESIMPULAN

Perkembangan pendidikan di Palembang pada tahun 1942-1950 memberikan gambaran yang penuh dengan kesulitan. Seperti yang kita ketahui pada tahun 1942 merupakan Jepang menjadikan Palembang sebagai pintu masuk sekaligus salah satu pangkalan terpenting dalam invasinya. Jadi ini memberikan perhatian khusus pada kepentingan politik Jepang di Asia Tenggara, khususnya di daerah Palembang dan reaksi lokal terhadap pemerintahan militer Jepang. Akan diperlihatkan

pula jalinan hubungan antara perkembangan periode pendudukan dengan periode sebelumnya.

Perubahan yang berlangsung selama periode pendudukan dan reaksi lokal yang memiliki pijakan sejak periode sebelumnya dapat dilihat dengan cara pandang seperti itu. Bagian pertama mengulas proses awal keterlibatan Jepang di Palembang dalam tataran politik regional Jepang di Asia Tenggara. Jepang menempatkan Palembang sebagai salah satu daerah inti dalam rencana pendudukan di daerah Sumatera Selatan khususnya di Palembang.

Perkembangan pendidikan di Palembang pada tahun 1942-1945 memberikan gambaran, dihapusnya dualisme pengajaran: berbagai jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman pemerintahan Belanda dihapuskan sama sekali. Sehingga hanya ada satu sekolah rendah, yaitu Sekolah Rakyat 6 tahun (*Kokimin Gakkoo*). Sekolah-sekolah desa diganti namanya menjadi sekolah pertama. Jadi, susunan pengajarannya adalah Sekolah Rakyat 6 tahun, Sekolah Menengah 3 tahun, dan Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi dan bahasa pengantar bagi semua jenis Sekolah. Bahasa Jepang

dijadikan mata pelajaran wajib dan adat kebiasaan Jepang harus ditaati.

Sedangkan perkembangan pendidikan di Palembang pada awal kemerdekaan dengan dipelopori Dr. A. K. Gani, keinginan membuka sekolah lanjutan ini ternyata baru dapat direalisasikan pada bulan Maret 1946. Menurut keterangan RHA Rani, seorang tokoh pendidikan di Sumatera Selatan, Residen Abdul Rozak mengatakan pada saat pembukaan Sekolah Lanjutan kira-kira sebagai berikut: "Di zaman kemerdekaan ini pemerintah ingin menunjukkan bahwa tidak ada lagi halangan atau hambatan bagi seluruh rakyat untuk masuk sekolah. Kiranya ucapan Residen Rozak tersebut mendapat sambutan masyarakat, terutama para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah Menengah di Palembang dan tidak perlu lagi mengirimkannya ke Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Abdullah, Ma'moen, Bandiman, dkk. 1991, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.
- Akib, Moehammad.R.H. 1975, *Sejarah dan Kebudayaan*

- Palembang. Palembang.
- Azis, M.A. 1955. *Japan's Colonialism and Indonesia*, Martinus Nijhoff, The Hague.
- Burhanuddin, Afid. 2011. *Pendidikan Indonesia masa Jepang*. Tanpa Penerbit
- Imran, Amrin. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid 6: Perang dan Revolusi*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve
- Irwanto Dedi. 2011. *Venesia Dari Timur*. Yogyakarta: Ombak.
- Irwanto Dedi dan Alian Sair. 2014. *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja_Publisher.
- Jumhari. 2010. *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang dari Masa kesultanan Palembang Hingga Reformasi*. Sumatra Barat. BPSNT Padang Press.
- Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kosim, Abu. 2001. *Riwayat Perjuangan Pada Masa Revolusi Phisik*. Palembang (Catatan Pribadi).
- Nasution, S. 2011. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

